

Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung

Evaluation Of Electronic Parking Machine Impact Policy In Bandung City

Diki Suherman

Universitas Padjajaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363

*corresponding author E-mail: dikisuherman44@gmail.com

Diterima: 2 Maret 2020 ; Direvisi: 29 Maret 2020 ; Disetujui: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2016 memasang mesin parkir yang berjumlah 445 mesin, dipasang di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung, sebagai inovasi di bidang transportasi untuk menunjang keberhasilan Kota Bandung sebagai *smart city*, untuk menciptakan layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik dan menghilangkan permasalahan umum di dalam transportasi seperti macet, pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Namun dalam penerapannya selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung, dari target Rp.118 miliar hanya tercapai Rp.6 miliar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi dampak kebijakan mesin parkir elektronik di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari *smart city* belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari berbagai aspek baik dari penggunaan mesin parkir, sistem pembayaran yang masih ada yang manual, target peningkatan retribusi parkir yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Adapun rekomendasi dari penelitian ini diantaranya : 1) sosialisasi yang maksimal yang tidak hanya melalui acara *incidental* tapi harus *continueitas*; 2) dibutuhkan rekrutmen yang baik untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten; 3) diperhatikan aspek-aspek lain melalui *forecasting* dan *Planing* yang baik untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menjadi kendala tidak terjadi peningkatan retribusi daerah.

Kata kunci: Evaluasi, Dampak Kebijakan, Mesin Parkir Elektronik (e-Parkir)

ABSTRACT

In 2016, the Bandung City Government installed 445 parking machines, installed in 211 road points in Bandung, as an innovation in transportation to

support the success of Bandung City as a smart city, to create publik services for better transportation and mobility and eliminating common problems in transportation such as traffic jams, traffic violations and increasing Local Revenue (PAD) through parking fees. However, in its implementation so far the parking machine has not been effective in increasing the local revenue (PAD) of the city of Bandung, from a target of Rp. 118 billion only reached Rp. 6 billion. The purpose of this research is to find out how to evaluate the impact of electronic parking machine policies in the city of Bandung. The method used in this research is descriptive qualitative. the application of electronic parking machines in the city of bandung as part of the smart city has not been realized optimally, which is seen from various aspects both of the use of parking machines, payment systems that are still manual, the target of increasing parking fees is far from the target of Local Original Revenue (PAD) Bandung. The recommendations of this study include: 1) maximum socialization that is not only through incidental events but must be love; 2) good recruitment is needed to choose competent human resources; 3) pay attention to other aspects through good forcesting and planing to find out the possible problems that become obstacles do not increase regional retribution.

Keywords: Evaluation, Policy Impact, Electronic Parking Machines (e-Parking)

PENDAHULUAN

Kota pintar/Smart City adalah suatu kota yang didalamnya sudah menggunakan teknologi dalam proses kegiatannya (Prasetyo, Harsan, & Pujiyana, 2019), dengan pendekatan citizen centric maka didapat suatu interaksi yang lebih baik dan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan jasa penyedia layanan, diharapkan interaksi antar dua pengguna dan penyedia semakin dinamis. Pada bidang transportasi, Kota Bandung sudah mulai giat memulai program - program berbasis teknologi salah satunya adalah dengan memasang mesin parkir elektronik. Peralihan dari manual menjadi menggunakan teknologi merupakan terobosan program yang dilakukan oleh Kota Bandung karena masalah parkir masih merupakan masalah serius di Kota Bandung (Arifani, Sari, & Rifkah, 2018).

Tabel 1. Jenis Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Parkir di Trotoar	0	69	126	183	260	105	141	99	108	143	347	635
2	Parkir di Bawah Rambu	0	52	107	163	234	84	219	115	99	138	280	452
3	Parkir di Zebra Cross	0	3	5	9	3	5	0	0	2	2	4	10
4	Parkir di Jembatan	0	2	6	5	0	0	0	0	5	2	1	4

5	Parkir di Persimpangan	0	1	6	8	2	1	4	3	2	1	13	35
6	Parkir di Bahu Jalan	0	37	72	70	99	95	85	30	17	115	176	205
7	Parkir di Luar Marka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	34
8	Parkir Ganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	38
9	Parkir di Halte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18

Sumber: Dishub Kota Bandung (2018)

Pada akhir Desember 2016, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengadakan 445 mesin parkir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung senilai Rp. 55 miliar. Mesin parkir elektronik itu telah dipasang di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung dengan mempekerjakan 700 juru parkir, para juru parkir ini digaji Rp 1.8 juta per bulan untuk memandu pengguna. Juru parkir yang dimaksud adalah juru parkir resmi berseragam oranye. Dengan zonasi wilayah yakni zona pusat : Jl Naripan, Jl. Dalem kaum, Jl. Braga, Jl. Cikapundung Timur, Jl. Cikapundung Barat, Kebon Jatim Jl. Ibu Inggit Ganarsih, Jl. Alkateri dan Jl Otista , zona penyangga : Kawasan Jl. Veteran, Jl. Sumatera, Jl. Cihampelas, Jl. Progo.

Dengan berbasiskan teknologi diharapkan berkurangnya parkir liar dan dapat berdampak pada pengurangan – pengurangan pelanggaran kendaraan, dengan ini Kota Bandung berpeluang akan menjadi kota yang aman,nyaman serta berkelanjutan dalam melaksanakan program berbasis teknologi. Penelitian tentang mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari penerapan smart city telah dilakukan oleh (Chandra, Sutan, Antonious, & Handoko, 2019; Dewi & Julianto, 2019; Nurmawan, Saadah, & Suwondo, 2019). Secara umum dalam penelitian mengenai penerapan smart city terkhusus dalam bidang transportasi yakni penerapan mesin parkir elektronik masih belum optimal dan berjalan dengan baik. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Winarno, 2012). Menurut Anam (2019) evaluasi adalah penggunaan metode pengujian atau penelitian sosial untuk mengetahui efektifitas suatu program. Sementara menurut Anggraenie & Setyono (2020) evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui / menguji apakah suatu kegiatan,proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan

atau kegiatan yang telah ditentukan. Suatu program tidak hanya sekedar dirancang dan dilaksanakan melainkan harus diukur pula sejauh mana efektifitas dan efisiensinya.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Maka dapat dikatakan kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebiijakan dibuat jelas atau diatasi (Siswoyo, Permana, & Jafar, 2020)

Para ahli mengidentifikasikan proses evaluasi kebijakan publik dari yang relatif kompleks sampai yang relatif sederhana. Dari berbagai teori evaluasi kebijakan, dapat digambarkan dalam bentuk yang paling sederhana dan umum. Sejalan dengan berbagai teori evaluasi yang dikemukakan oleh banyak ahli: (i) Braybrook dan Lindblom menekankan pada evaluasi yang memberikan assessment pada beberapa nilai yang sudah sangat umum; (ii) Laura Irwin Langbein (1980) menekankan pada sifat evaluasi terhadap satu program yang ilmiah dan politis; (iii) Leonard Rutman (1980) menekankan evaluasi program untuk mengukur efektifitas dari pelaksanaan program; (iv) J. L. Pressman and Wildavsky (1984) memberikan penekanan pada kelemahan-kelemahan dalam evaluasi; (v) Peter H. Rossi and Howard E. Freeman (1993) menekankan pada evaluasi terminologi komprehensif atau menyeluruh; (vi) Stuart S. Nagel (2002) menekankan pada model yang menggambarkan kecenderungan penggunaan banyak metode di dalam model yang menggambarkan kecenderungan penggunaan banyak metode di dalam evaluasi kebijakan publik serta; (vii) Hellmut Wollmann (2003) melihat bahwa studi evaluasi secara kronologis pada gelombang sejarah waktu.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Termasuk inovasi kebijakan dalam menerapkan smart city yang coba diterapkan oleh Kota Bandung terkhusus dalam bidang transportasi yakni mesin parkir elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana evaluasi dampak kebijakan dalam penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evaluasi dampak kebijakan dalam penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) dengan menggambarkan yang didapat oleh peneliti dilapangan baik melalui observasi , wawancara dan study pustaka serta literatur lain yang berkaitan dengan kebijakan publik terkhusus dalam hal evaluasi dampak kebijakan (Yusuf, 2016). Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi data (Jang & Kim, 2019) , yang memuat tiga hal yakni reduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak diperlukan, memverifikasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Serta mengevaluasi program dengan melihat dari indicator Input, Produk, Output dan Outcame (Alia & Maulana, 2019).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, Hasil bukan data mentah, tetapi data yang sudah diolah dan diinterpretasikan dalam bentuk data statistik, baik berupa tabel, grafik, bagan, sketsa, maupun foto yang dipadukan dengan teori yang relevan (Septiadi, 2019). Sedangkan pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. pembahasan merupakan hasil analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil dan

pembahasan harus menjawab permasalahan penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk solusi/memberikan dampak positif bagi pengembangan iptek di masyarakat. Penulisan judul tabel (cambria 10) dan isi tabel (cambria 10; 1 spasi). Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst. Apabila mengutip tabel dari bacaan/ referensi lain, harus dicantumkan. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul, dalam tinjauan pustaka ditulis dengan font cambria 10 dan isinya font cambria 10 (1 spasi). sumbernya.

INDIKATOR INPUT

Memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016). Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. *Pertama*, dilihat dalam aspek sumber daya tentu pemerintah Kota Bandung memiliki sumberdaya yang mencukupi yang menunjang dalam penyelenggaraan konsep *smart city* dalam bidang transportasi dengan mempekerjakan 700 juru parkir, para juru parkir ini digaji Rp 1.8 juta per bulan. *Kedua*, dilihat dalam aspek keuangan atau anggaran pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp. 55 miliar dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk pembelian 445 mesin parkir yang tersebar di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung. *Ketiga*, dilihat dari infrastruktur pendukung lainnya pemerintah Kota Bandung membuat zonasi wilayah untuk penempatan tiap mesin parkir elektronik agar mudah dijangkau oleh para pengendara, yang terdiri dari zona pusat yang diantaranya terletak di Jl. Narijan, Jl. Dalem kaum, Jl. Braga, Jl. Cikapundung Timur, Jl. Cikapundung Barat, Jl. Kebon Jatim, Jl. Ibu Inggit Ganarsih, Jl. Alkari, Jl. Otista. Sedangkan zona penyangga yang diantaranya terletak di Kawasan Jl. Veteran, Jl. Sumatera, Jl. Cihampelas, Jl. Progo.

Penerapan mesin parkir elektroik ini memang ada kendala teknis, seperti sosialisasi dan penerapan petugasnya. Untuk juru parkir kita sudah lakukan bimbingan agar mengarahkan pemilik kendaraan melakukan tap di mesin parkir yang selain diatur dengan system teknologi juga dibantu dengan juru parkir yang mengarahkan bagi para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya dan cara menggunakan mesin parkir, namun ketika ditemui dilapangan tidak semua juru parkir ini tak selalu ada di tempat mesin parkir itu berada, melainkan masih adanya tukang parkir liar yang seperti biasa memarkirkan kendaraan secara manual, yang artinya dua kali lipat bayar parkir , disisi lain membayar kmelalui mesin disisi lain juga melalui tukang parkir liar, hal inilah yang memang penerapan di tingkat teknis tidak terduga walaupun telah diatur sedemikian rupa.

Kendala lain yang dihadapi ketika mesin parkir mengalami kerusakan, karena merupakan produk luar negeri yang sudah tidak di produksi lagi, sedangkan di Indonesia tidak ada yang bias memperbaiki , karena dengan teknologi yang belum menjangkau dalam memperbaiki mesin parkie elektronik tersebut, maka itu perlahan mesin parkir mulau terabaikan dan jadi obenj vandalism di Kota Bandung.

INDIKATOR PROSES

Dinilai dengan melihat kebijakan di implementasikan kedalam pelayanan kepada masyarakat. Indikator ini melihat pada efisiensi dan efektifitas dari suatu kebijakan yang di jalankan (Indrawati, 2016). Pada aspek ini inovasi mesin parkir elektronik difungsikan sebagai alat pembayaran dengan kelengkapan berupa layer video berwarna, pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik pada kartu pintar. Menggunakan keyboard dan pengeras suara. Kartu pintar disini adalah kartu yang sudah terintegrasi dengan teknologi seperti brizzi dari BRRI, E-money dari mandiri serta Tap cash dari bank bni. Sal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengelolaan secara baik dalam percepatan pemerintahan Kota Bandung. Oleh karena itu bandung dapat menjadi kota yang lebih nyaman dan aman.

Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah mulai dilakukan pada Juli 2017. Namun, hingga sekarang efektifitas dari mesin tersebut juga tak terlihat. Sayangnya, semangat melakukan sosialisasi untuk penggunaan mesin parkir, perlahan mulai diabaikan. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama dari implementasi kebijakan ini dimana masih ada masyarakat yang menganggap mesin elektronik rusak akibat kurangnya pengetahuan cara menggunakan mesin parkir elektronik tersebut..

Keberadaan mesin tersebut, Didi Kadishub Kota Bandung mengatakan, pemasangan PAD dari mesin parkir sudah ada namun belum optimal. Didi menyebut, pihaknya tengah berupaya melakukan sosialisasi guna optimalisasi mesin parkir tersebut. Sejumlah juru parkir (jukir) resmi yang ada di Kota Bandung mengakui mereka mendapatkan bimbingan dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengarahkan pemilik kendaraan menggunakan mesin parkir. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah. Banyak pemilik kendaraan yang milih bayar manual karena mereka bilang gak mengerti. Kadang -kadang kita yang bantuin mereka buat pakai mesin parkirnya, tapi kebanyakan tidak mau pakai.

INDIKATOR OUTPUTS (HASIL)

Memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik (Adriyanto & Kismartini, 2016). Dilihat dari hasil , terlihat dengan adanya mesin parkir elektronik sebagai bagian dari penerapan konsep *smart city* di Kota Bandung dengan tersebarnya mesin parkir elektronik disetiap 57 ruas jalan yang telah ditentukan untuk melayani publik dalam bidang transportasi .

DPRD Kota Bandung melalui Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem Rendiana Awangga menanggapi mesin parkir yang ada memang harus dievaluasi. anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mesin parkir terbilang cukup besar. menyisahkan pengadaan mesin parkir di wilayahnya tak mempengaruhi pendapatan daerah Kota Bandung. Sama sekali tidak ada dampak penambahan PAD dari mesin parkir. Padahal kajian menyatakan

bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Bandung itu mencapai 80 M. Kamis, 1 Agustus 2019.

Dalam hal ini keberadaan mesin parkir yang tersebar di Kota Bandung dengan dan APD yang cukup besar, belum menemui hasil yang diharapkan , terutama dalam penerapannya, masih banyak kendala yang ditemui baik cara mengoperasikannya, system pembayarannya yang kadang masih ada saja membayar langsung ke juru parkir.

INDIKATOR OUTCOMES (DAMPAK)

Memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan (Kireina, 2017). Dilihat dari sisi dampak, adanya mesin parkir elektronik ini selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara dalam memarkirkan kendaraannya juga menciptakan ketertiban ruang parkir di Kota Bandung. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung melalui retribusi parkir.

Pada indicator ini penarikan biaya parkir masih belum baik dikarenakan masih menggunakan system parkir manual dengan cara penarikan biaya oleh juru parkir. Oleh karena itu berdampak pada penerimaan pendapatan pemkot dari jalur retribusi parkir, padahal outcome dari retribusi parkir ini sangat besar, terutama pada saat liburan, mesin parkir yang dibeli dengan menggunakan uang APBD masih belum optimal dalam menarik biaya retribusi itu dilihat dari masih jauhnya target yang di tetapkan dengan relalisasi dilapangan.

Anggota komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi sebagai bentuk pemborosan anggaran. Sebab, sejak diterapkannya penggunaan mesin tersebut tidak memiliki manfaat berarti. Dia menyebutkan, selama ini pendapatan retribusi parkir tidak maksimal. Bahkan, dari target Rp135 miliar hanya tercapai Rp6 Miliar saja dalam setahun. Sehingga, kondisi ini tidak ada bedanya sebelum ada mesin parkir. Proyek itu telan menelan anggaran pemerintah hingga Rp80 Miliar dengan pengadaan berdasarkan e-katalog

dengan merek Cale dengan harga Rp125 Juta per unit. Akan tetapi, setelah hampir satu tahun di operasikan tidak menunjukkan kenaikan pendapatan secara signifikan.

Untuk memberikan kelancaran terhadap manajerial parkir di Kota Bandung, Dishub kota mengajukan UPTD parkir menjadi BLUD (badan layanan usaha daerah). Prosesnya masih menunggu kajian dari Kemendagri. Penyiapan pemerintahan perlu dilakukan untuk mencegah kehilangan potensi-potensi pendapatan daerah. Untuk itu pemerintah Kota Bandung sudah mulai menyiapkan suatu perubahan dari UPT parkir menjadi Badan layanan umum, diharapkan dengan perubahan Lembaga ini dapat lebih meningkatkan pendapatan dari sector retribusi dimana pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan seseorang SDM professional untuk menghadapi masalah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi dampak kebijakan mesin parkir elektronik di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari *smart city* belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari berbagai aspek baik dari penggunaan mesin parkir, sistem pembayaran yang masih ada yang manual, target peningkatan retribusi parkir yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam penelitian ini untuk memberikan perbaikan dimasa mendatang diantaranya : 1) Agar masyarakat atau pengendara paham cara mengoperasikannya maka lakukan sosialisasi maksimal yang tidak hanya melalui acara *incidental* tapi harus *cintinueitas*; 2) Agar juru parkir bisa maksimal dalam mengelola mesin parkir dibutuhkan rekrutmen yang baik untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten; 3) Agar tidak mengalami penurunan retribusi yang menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) harus diperhatikan aspek-aspek lain

melalui *forcesting* dan *Planing* yang baik untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menjadi kendala tidak terjadi peningkatan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, T., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 396–409.
- Alia, S., & Maulana, J. (2019). Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung Analysis of the Regional Development and Empowerment Program in Bandung City. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*.
- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 112–122.
- Anggraenie, N. T., & Setyono, J. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Konservasi Kota Kecil Lasem, Kabupaten Rembang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 9(1).
- Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R. (2018). Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 147–155.
- Chandra, N., Sutan, K., Antonious, C., & Handoko, C. (2019). Aplikasi Parkir Menggunakan Ionic Framework dan Firebase. *Engineering, Mathematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 1(1), 43–48.
- Dewi, R. S., & Julianto, P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), 390–401.
- Indrawati, N. (2016). Penyusunan anggaran dalam era new public management: Implementasinya di Indonesia. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 10(2).

- Jang, B.-W., & Kim, C.-G. (2019). Impact localization of composite stiffened panel with triangulation method using normalized magnitudes of fiber optic sensor signals. *Composite Structures*, 211, 522–529.
- Kireina, N. F. (2017). Mesin parkir elektronik sebagai wujud dari smart city di kota bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 63–80.
- Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 2(20).
- Nurmawan, A. R., Saadah, K., & Suwondo, S. (2019). Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1274–1284.
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1).
- Septiadi, M. A. (2019). Strategi Kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 71–86.
- Siswoyo, M., Permana, I., & Jafar, L. A. (2020). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.